

SOCIAL CAPITAL FORMATION SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNITAS BERBASIS ASET DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

(Studi Kasus Kepariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur)

Oleh Willy Tandikara *) & Robert Markus Zaka Lawang)**

Abstract

Currently tourism is considered to have a potential role as a driver of socio-economic development. The tourism sector has its own attractiveness, making it the choice for the perpetrators to get a better life gained through the multiplier effect in job opportunities, business opportunities and income distribution. However, studies that analyze the structures of capital owned by local communities in relation to the tourism industry and how the increase of capital through social capital in order to create new opportunities that can increase local participation in the tourism industry are still very small. This research attempts to fill this gap by exploring the tourism industry in Labuan Bajo, West Manggarai, East Nusa Tenggara. By identifying the capital possessed by local communities and opportunities that can arise through social capital. This research uses a qualitative approach type with case study research. In this study found the low level of capital owned by local communities that hinder their participation in the tourism industry, and how social capital can play its role to enhance the role of local communities in the tourism industry

Keywords: community capital, social capital, tourism development, community participation.

Abstrak

Saat ini pariwisata dianggap memiliki peran yang potensial sebagai penggerak pembangunan sosio-ekonomi. Sektor pariwisata memiliki daya tarik tersendiri sehingga menjadi pilihan bagi para pelakunya untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik yang didapat melalui *multiplier effect* dalam kesempatan kerja, peluang berusaha dan distribusi pendapatan. Namun, penelitian yang menganalisis struktur kapital yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam kaitannya dengan industri pariwisata dan bagaimana peningkatan dari kapital tersebut melalui kapital sosial demi memunculkan peluang baru yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata masih sangat sedikit. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi industri pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengidentifikasi kapital yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan peluang yang dapat muncul melalui kapital sosial. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini ditemukan masih rendahnya tingkat kapital yang dimiliki oleh masyarakat lokal sehingga menghambat partisipasi mereka dalam industri pariwisata, dan bagaimana kapital sosial dapat memainkan perannya demi meningkatkan peran masyarakat lokal dalam industri pariwisata

Kata kunci: kapital masyarakat, kapital sosial, pembangunan kepariwisataan, partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menawarkan pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan baik pada tingkat lokal maupun global. Sebelumnya, hubungan antara pariwisata dan kemiskinan berada pada dua domain yang tidak berhubungan (Bowden, 2005: 379). Namun saat ini pengentasan kemiskinan pun menjadi hal yang penting dalam agenda pariwisata, karena pariwisata dianggap memiliki peran yang potensial sebagai penggerak

pembangunan sosio-ekonomi (Sharpley, 2009: *preface*).

Pariwisata, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatannya di negara maju dan menjadi kekuatan untuk membantu pengurangan kemiskinan dalam proses pembangunan di negara berkembang. Di negara besar, kombinasi antara pariwisata domestik dan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang substansial (Inskeep, 1988: 360). Bagi beberapa negara, khususnya negara

kepulauan kecil, pariwisata menjadi sumber utama bagi pendapatan negara yang penting. Oleh karena itu maka sektor pariwisata memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan institusi terkait agar pembangunan yang dilakukan pada sektor pariwisata dapat memberikan keuntungan ekonomi, lingkungan dan juga sosial

Pariwisata menjanjikan pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan devisa, pendapatan pajak dan investasi baru, diversifikasi perekonomian pada tingkat lokal, dan penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. secara tradisional, pertumbuhan ekonomi suatu kawasan mendominasi sebagai tujuan utama dari pembangunan pariwisata di tingkat lokal, sementara pengentasan kemiskinan dianggap sebagai sub-tujuan atau pendapatan alami dari pertumbuhan ekonomi kawasan (Ashley *et al.*, 2000; Deloitte & Touche *et al.*, 1999 dalam Goodwin, 2002: 338).

Ada keyakinan yang umum bahwa selama seluruh wilayah menjadi lebih kaya, maka manfaat yang dibawa oleh pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menetes ke bawah kepada orang miskin melalui berbagai saluran, seperti pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan jaringan keluarga (Zeng, Carter, De Lacy, & Bauer, 2005: 131). Oleh karena itu, pembuat kebijakan biasanya memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pariwisata, tetapi perhatian yang diberikan terhadap permasalahan seberapa jauh pembangunan pariwisata dalam prakteknya dapat berkontribusi kepada pengentasan kemiskinan jauh lebih sedikit (Christie, 2002: 35). Sebagai hasilnya, dampak dari pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan menjadi tidak langsung. Seharusnya pariwisata dapat mengangkat kondisi masyarakat miskin, tujuan pariwisata harus berusaha untuk meningkatkan kedatangan wisatawan dan pendapatan (Jamieson, *et al.*, 2004 dalam Snyman, 2012: 395).

Di negara berkembang, permasalahan kemiskinan antara lain dilatarbelakangi oleh pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dimana industrialisasi dinilai sebagai satu cara efektif untuk mengejar ketertinggalan negara berkembang dari negara maju. Istilah pembangunan sendiri memiliki konotasi kesejahteraan yang menawarkan perbaikan kondisi hidup masyarakat, sehingga pembangunan sering diasosiasikan dengan kemajuan ekonomi (Midgley, 2005: 3). Namun pembangunan ekonomi dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dianggap gagal

mendistribusikan keuntungan dari kemajuan ekonomi kepada masyarakat keseluruhan (Midgley, 2005: 5).

Apabila tujuan pengembangan sektor pariwisata menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhirnya maka manfaat yang muncul dari sektor pariwisata akan sulit terdistribusi kepada mereka yang memiliki akses terbatas terhadap pariwisata yang berlangsung di tempat mereka tinggal. Pengembangan pariwisata yang mengejar pertumbuhan ekonomi tentunya memerlukan biaya besar yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal sehingga harus mendatangkan investor dari luar yang pada akhirnya distribusi keuntungan yang muncul dari sektor pariwisata akan menjadi timpang karena hanya akan dinikmati oleh segelintir orang yang mampu berinvestasi di sektor pariwisata

Terlepas dari hal di atas, sektor pariwisata tetap memiliki daya tarik tersendiri sehingga menjadi pilihan bagi para pelakunya untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik yang didapat melalui *multiplier effect* dalam kesempatan kerja, peluang berusaha dan distribusi pendapatan. Seperti halnya di banyak negara lain yang terus mengembangkan industri pariwisatanya, Indonesia saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu program pembangunan prioritas dalam Kabinet Kerja 2015-2019. Indonesia memiliki target pada tahun 2019 sektor pariwisata harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta wisatawan dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia (Yahya, 2015).

Menteri Pariwisata Indonesia periode 2015-2019, Arief Yahya, menyampaikan 10 pembangunan destinasi wisata prioritas, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang (Yahya, 2015). Satu dari 10 destinasi wisata prioritas tersebut adalah Kota Labuan Bajo yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang merupakan gerbang masuk utama menuju Taman Nasional Komodo (TNK). Keberadaan TNK sudah dikenal oleh dunia sejak lama, pada tahun 1977 TNK ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer, kemudian pada tahun 1991 UNESCO memberikan predikat TNK

sebagai warisan alam dunia, hingga pada tahun 2012 TNK menyandang predikat sebagai tujuh keajaiban alam dunia (Balai Taman Nasional Komodo, 2013: 2).

Pariwisata yang berlangsung di TNK adalah pariwisata berbasis alam yang menjadikan komodo dengan keseluruhan ekosistemnya sebagai atraksi utamanya. Pariwisata yang berbasis alam memiliki beberapa masalah, seperti dominasi oleh perusahaan internasional terhadap industri pariwisata, kebocoran keuntungan yang di dapat, dominasi ekspatriat dalam sektor pariwisata, dan keuntungan yang tidak signifikan terhadap kawasan dimana aktifitas pariwisata tersebut berlangsung (Britton, 1982; Wallpole & Goodwin, 2000; Goodwin, 2002; J.E. Mbaiwa & M.B.K. Darkoh, 2008)

Pengembangan pariwisata selama ini dilakukan di Labuan Bajo sebagai akses utama untuk memasuki wilayah TNK. Dengan Labuan Bajo sebagai titik masuk dan keluarnya para wisatawan yang akan mengunjungi TNK, pembangunan fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata, seperti hotel, tempat makan, *travel & tour guide* pun menjadi marak di Labuan Bajo. Dengan maraknya pembangunan tersebut maka kebutuhan akan para pekerja yang dapat menunjang industri pariwisata ini pun bertambah. Berkembangnya kepariwisataan di Labuan Bajo juga kurang memiliki keterkaitan antara industri dan sektor produksi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Labuan Bajo. Pariwisata adalah bisnis tersier yang berkembang di mana industri primer seperti pertanian dan perikanan telah menjadi industri yang dominan, tanpa pengembangan sektor sekunder menengah. Pariwisata bergantung pada industri sektor sekunder, seperti industri manufaktur untuk penyediaan barang memproses dan mengemas barang untuk dijual, dan untuk sebagian besar infrastruktur. ketidakhadiran mereka secara lokal, dan kurangnya hubungan dengan mereka, menyumbang banyak kebocoran (Walpole & Goodwin, 2000: 559).

Penelitian yang dilakukan oleh Hampton (2005) di Indonesia menyarankan agar kementerian pariwisata dan pemerintah daerah harus memberikan dukungan lebih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata melalui pelatihan bisnis penyediaan, memastikan masyarakat setempat memiliki akses terhadap kapital, dan melakukan perencanaan pariwisata untuk memasukkan prioritas warga setempat.

Berangkat dari gambaran di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap *Formation Social Capital* untuk dapat memberikan peran lebih besar terhadap masyarakat lokal untuk dapat memaksimalkan kapital yang dimiliki guna mengakses industri pariwisata.

2. METODOLOGI

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan proses pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan subjek yang akan diteliti sehingga akan dapat dilihat dan dipahami secara jelas permasalahan yang terjadi serta dapat menangkap variasi antar kejadian. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini harus dapat melihat detail yang terdapat dalam kasus-kasus yang terdapat di dalamnya. Detail yang dimaksud muncul dari proses sosial dan hubungan sebab-akibat baik pada tingkat mikro maupun pada struktur yang lebih besar yang memiliki kerumitan tersendiri untuk dapat memahaminya. Oleh karena itu di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case-study*), karena jenis penelitian ini memungkinkan untuk menghubungkan tingkat mikro, atau tindakan individu, dengan tingkat makro, atau struktur skala besar dan proses (Vaughan, 1992 dalam Neuman, 2014: 42). Selain itu, jenis penelitian studi kasus memiliki banyak kekuatan karena dapat memberikan kejelasan dalam pemikiran dan memungkinkan untuk menghubungkan ide-ide abstrak dalam cara tertentu secara spesifik dari kasus yang diamati secara detail (Neuman, 2014: 42).

Jenis penelitian studi kasus memungkinkan untuk dapat menghasilkan atau membangun teori baru serta membentuk kembali teori-teori yang ada saat ini untuk kasus yang kompleks atau situasi baru. Untuk dapat menghasilkan atau membangun teori tersebut maka diperlukan visibilitas antar hubungan yang tinggi dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan penjelasan yang lebih komprehensif sehingga dapat menangkap kompleksitas kehidupan sosial. Jenis penelitian studi kasus dapat memberikan bukti secara lebih efektif yang menggambarkan beberapa faktor atau situasi dan proses yang kompleks yang terjadi. Penelitian studi kasus juga dapat menggabungkan seluruh situasi dan berbagai perspektif di dalamnya (Walton, 1992 dalam Neuman, 2014: 42).

Dalam penelitian ini akan dilakukan pemilihan atau penarikan sampel yang akan dijadikan sebagai informan penelitian yang merupakan orang atau sekelompok orang yang diminta keterangan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan kajian yang diteliti. Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), yaitu suatu teknik pengambilan informan secara tidak acak dengan mempertimbangkan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Neuman, 2014: 274). Dalam menggunakan *purposive sampling*, informan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pariwisata yang berlangsung di Labuan Bajo. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterkaitannya dengan topik penelitian maka informan yang dianggap tepat dan berkompeten dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memenuhi kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan dan informasi mengenai kondisi kegiatan pariwisata yang berlangsung di Labuan Bajo, mulai dari perwakilan Balai Taman Nasional Komodo, perwakilan Dinas Pariwisata Kota Labuan Bajo, masyarakat yang menetap di Labuan Bajo dan di dalam kawasan TNK, dan para pelaku usaha yang menunjang kegiatan pariwisata.

Selain menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu suatu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara bertahap. Pertama akan diidentifikasi dan dipilih informan yang dapat memberi informasi untuk diwawancara, kemudian informan tersebut akan dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi. Demikian proses ini akan berlangsung secara terus menerus hingga terpenuhi jumlah sampel dan informasi yang dikehendaki (Neuman, 2014: 275).

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Model analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kapital Manusia dalam Industri Kepariwisata di Labuan Bajo

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk lokal membatasi keterlibatan mereka dalam industri pariwisata. Keahlian dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal hanya dapat dimanfaatkan untuk memasuki industri pariwisata pada tingkat rendah, seperti yang disampaikan oleh Intv 11 berikut ini: “Tidak ada yang lain yang kami bisa, jadi kami di sini hanya antar-antar tamu saja”.

Para pemangku kepentingan yang terkait pun sebenarnya mengetahui tentang kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, sehingga ada berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Intv 2 mengatakan bahwa “ada juga pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan yang kita sediakan untuk masyarakat seperti kelas bahasa Inggris, pemberdayaan pemuda, dan pelatihan memasak”. Sementara Intv 1 mengatakan, “Tentunya kita dorong masyarakat untuk dapat ikut dalam pariwisata . . . kalau dari kita tentunya yang berhubungan dengan lingkup kerja kita . . . jadi bentuk pelatihan yang kita beri kepada masyarakat adalah pelatihan kerajinan, pelatihan pemandu, dan kedepannya kita sedang merencanakan untuk membuat pelatihan untuk pemandu khusus *snorkeling* yang mungkin akan memanfaatkan MMP (masyarakat mitra polhut)”. Ada juga pelatihan yang diberikan oleh pihak swasta kepada masyarakat, salah satunya seperti yang diutarakan oleh Intv 6: “*We have also given training to the community in the national park area, to become our dive masters*”. Namun, beberapa informan mengatakan bahwa hal tersebut hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja yang memiliki kedekatan secara personal dengan para pembuat kebijakan.

Intv 13 mengatakan, “Mereka itu dapat pelatihan macam-macam karena dekat dengan yang di atas . . . karena tidak semua dapat pelatihan tetapi hanya orang-orang yang nanti dipilih lewat forum, tetapi ya dengan alasan macam-macam pula nanti yang terpilihnya ya dia punya keluarga atau teman juga”. Selain itu Intv 14 mengatakan, “Pelatihan-pelatihan itu memang ada, tapi bukan untuk kami-kami ini, contohnya pelatihan masak itu untuk yang jual di Kampung Ujung, tetapi yang jual itu bukan orang asli Manggarai, banyaknya pendatang itu”. Dari dua hasil interview di atas terlihat ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan, karena pelatihan yang ada seakan sudah ditentukan untuk siapa dan juga tidak tepat sasaran.

b) Kapital Sosial dalam Industri Kepariwisata di Labuan Bajo

Masyarakat lokal yang tinggal di Labuan Bajo berbagi kesulitan yang sama dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Walaupun jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo sangat banyak, tetapi proses transaksi yang dilakukan oleh wisatawan baik domestik maupun internasional sudah selesai sebelum wisatawan tersebut datang ke Labuan Bajo. Seperti yang dikatakan oleh Inv 15 berikut ini: “Mayoritas wisatawan yang datang ke sini itu sudah ambil paket dari sana (tempat asal wisatawan) ada yang langsung bayar full atau tanda jadi dulu, jadi begitu sampai di sini sudah ada semua untuk keperluan mereka”.

Bahkan ada istilah menarik dari masyarakat terkait operator wisata di Labuan Bajo, seperti yang diungkapkan oleh Intv 13 berikut ini: “Kalau di sini ada banyak bentuk operatornya, ada *dollar* ketemu *dollar* ada juga suku ketemu suku, karena rata-rata operator di sini sudah berkelompok, jadi misal turis asing pasti banyak yang cari operator dari negaranya, sering juga bayarnya pake uang mereka punya . . . ada juga yang kelompoknya itu dari suku itu-itu saja, jadi untuk orang lokal cukup susah untuk masuk ke sana”.

Masyarakat lokal justeru tereksklusi dari industri pariwisata yang berada di Labuan Bajo, karena seluruh sebagian besar keperluan untuk wisatawan sudah terpenuhi oleh operator wisata yang dipilih oleh wisatawan jauh sebelum wisatawan tersebut datang ke Labuan Bajo, sehingga menyebabkan masyarakat lokal tidak mendapatkan distribusi keuntungan yang merata dari industri pariwisata yang sebenarnya.

c. Kapital Lingkungan dalam Industri Kepariwisata di Labuan Bajo

Daya tarik utama dari wisata utama Manggarai Barat sendiri tidak berada di Labuan Bajo, tetapi di Taman Nasional Komodo, walaupun sebenarnya kedatangan wisatawan ke dalam kawasan TNK bukanlah untuk melihat komodo yang hidup dalam habitat aslinya, tetapi untuk melakukan kegiatan wisata bahari yang ditawarkan dalam paket wisata yang dipilih oleh wisatawan tersebut, seperti yang diungkapkan salah satu wisatawan mancanegara (Intv 25) “*Actually, my goal here is not to see the dragons, the dragons are just a bonus for me. I am here to enjoy the natural scenery, especially the sea and beaches, which tempt me to immediately dive and see the beauty under the sea*”.

Wisatawan lainnya juga mengungkapkan tujuan utama berwisata ke TNK bukanlah untuk

melihat komodo, salah satunya adalah wisatawan lokal yang mengatakan (Intv 20) “Ingin main-main di pantai *aja sih*, sama LOB *aja* paling. . . kalau komodonya si ya pelengkap *aja*, masa ke Pulau Komodo tapi *gak liat* komodo”

Intv 2 mengakui bahwa saat ini atraksi utama dari pariwisata di Labuan Bajo berada di dalam kawasan TNK: “Panggung utamanya kan di TNK sana, kalau yang di daratan belum terlalu banyak yang datang, lagipula infrastrukturnya juga belum layak . . . kalau wisata yang berada di Manggarai Barat ini biasanya hanya untuk mengisi waktu luang saja, jadi sambil menunggu jadwal menuju ke TNK sana atau ketika sudah dari TNK dan tinggal menunggu jadwal pulang saja . . . tapi kami juga mulai membenahi itu semua agar nantinya potensi-potensi wisata yang lain di Manggarai Barat juga dapat menjadi pilihan utama wisatawan, agar nantinya dapat terbagi untuk objek wisata yang bisa di datangi, jadi tidak menumpuk di TNK saja. Harapannya tentu untuk masyarakat juga, jadi lebih merata untuk turut berpartisipasi”

d. Kapital Manusia dalam Industri Kepariwisata di Labuan Bajo

Posisi masyarakat lokal di Labuan Bajo saat ini berada di ujung rangkaian dari proses kepariwisataan, sehingga mereka tidak dapat secara langsung mengontrol industri pariwisata yang berlangsung di Labuan Bajo. Salah satu aspek yang menempatkan mereka pada posisi tersebut adalah rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengetahuan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam industri pariwisata di mana hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang nantinya akan ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Putnam dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial mempunyai pengaruh yang besar sebab beberapa dimensi pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain, kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Hal ini terbangun oleh adanya rasa saling mempercayai, kohesivitas, tindakan proaktif, dan hubungan internal-eksternal dalam membangun jaringan sosial didukung oleh semangat kebajikan untuk saling menguntungkan sebagai refleksi kekuatan masyarakat. Situasi ini akan memperbesar kemungkinan percepatan perkembangan individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. Bagaimanapun juga kualitas individu akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat itu berarti pembangunan manusia paralel dengan pembangunan sosial.

e. Kapital Sosial Dalam Industri Kepariwisata di Labuan Bajo

Apa yang disampaikan oleh Intv 13 tentang *dollar* ketemu *dollar* atau suku ketemu suku adalah konsekuensi negatif dari modal sosial yang menimbulkan pengecualian terhadap orang dari luar kelompoknya. Adanya ikatan yang terlalu kuat dalam suatu kelompok tertentu akan membawa manfaat bagi anggota kelompoknya saja tetapi tetapi memperbesar kemungkinan untuk menghalangi orang dari luar kelompoknya untuk dapat mengakses apa yang dimiliki kelompok tersebut (Portes, 1998: 15).

Sebagian besar wisatawan ketika tiba di Labuan Bajo sudah terlebih dahulu mengambil paket wisata dari daerah asalnya sehingga para wisatawan sebenarnya hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi lokal. Seluruh kebutuhan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara sudah terlebih dahulu dipersiapkan oleh operator wisata, yang pada akhirnya memperkecil kesempatan masyarakat lokal untuk dapat berinteraksi dengan para wisatawan yang datang.

Dengan pola pariwisata seperti ini maka membuat rendahnya kontak antara wisatawan dan masyarakat lokal, sehingga berdampak pada rendahnya kontribusi industri pariwisata terhadap ekonomi lokal. Pola pariwisata yang ada saat ini justru tidak memihak masyarakat karena pola pariwisata yang ada justru memperlebar jarak antara masyarakat dan wisatawan. Industri pariwisata saat ini berada dalam lingkungan yang eksklusif yang mempersulit masyarakat lokal untuk mendapat kesempatan untuk merasakan manfaat dari industri pariwisata yang berlangsung. Hal ini adalah apa yang Dasgupta (2003) sebut dengan kapital sosial negatif, karena kapital sosial digunakan hanya untuk mengakomodasi kepentingan sepihak dari kelompok tertentu saja

dan merugikan kelompok lain atau masyarakat yang lebih luas. Seharusnya kapital sosial menjadi fitur dari organisasi sosial yang dapat meningkatkan efisiensi dari masyarakat dengan memfasilitasi aksi yang terkoordinasi (Putnam, 1993: 36).

Munculnya kapital sosial negatif ini dikarenakan peran dari bonding social kapital yang terlampau kuat atau terlalu dominan. Oleh karena itu, dalam pola pariwisata yang seperti ini, diperlukan peran dari bridging dan linking dari kapital sosial. Namun dalam industri pariwisata dimana masyarakat sudah tereksklusi dari struktur pengelolaan pariwisata maka *linking social capital* memiliki peran penting dalam mengurangi *bonding social capital* dan memberikan landasan untuk menciptakan bridging social kapital yang lebih kuat.

Agar kapital sosial dapat menjadi penentu pembangunan pariwisata yang partisipatif dan mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal, maka para pemangku kepentingan harus dapat memberikan perhatian terhadap bentuk perencanaan pembangunan pariwisata pada aspek-aspek yang tidak terlihat. Perencanaan sebaiknya tidak hanya sebatas membuka lapangan pekerjaan, menyalurkan pinjaman, menghasilkan pendapatan, dan melatih tenaga kerja tetapi, harus juga mampu untuk membangun tingkat kepercayaan antar pribadi, rasa memiliki dan tanggung jawab, serta adanya keterlibatan masyarakat. Pendekatan pembangunan kepariwisataan harus mulai melibatkan kelompok masyarakat yang ada di tingkat akar rumput. Dengan demikian mereka dapat mengorganisir diri mereka dalam kelompok di mana mereka dapat memiliki persepsi, melakukan pengambilan keputusan kolektif dan implementasi kolektif.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata sangat tergantung pada akses kepada pasar. Seringkali, manfaat lokal dimaksimalkan di sektor informal di mana skala investasi modal rendah. Kelompok minat di luar komunitas pedesaan (kelompok tur, pelaku bisnis perhotelan, dan lembaga pemerintah) lebih banyak menggunakan tenaga sektor formal karena sumber daya keuangan komando mereka. Kemampuan penduduk lokal untuk mendapatkan akses sebagian tergantung pada harapan turis sendiri dan pemasok lokal memiliki sedikit kendali atas jalannya pengalaman dipasarkan. Hal yang sama juga berlaku bagi sebagian besar wisatawan paket yang menggunakan perahu sewaan dari Sape. Dari kepentingan khusus adalah kurangnya kesempatan

bagi orang yang tinggal di dalam taman untuk mendapat manfaat dari pariwisata. Pelatihan dan pengembangan proyek-proyek berskala kecil, dan integrasi yang lebih besar dengan perkembangan pariwisata di dalam taman, akan sangat meningkatkan manfaat yang diterima penduduk taman dari pariwisata.

Berdasarkan temuan lapangan, daya tarik wisata di Manggarai Barat adalah keindahan alam, terutama keindahan pantai dan lautnya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat lokal karena untuk dapat berpartisipasi.

f. Kapital Lingkungan dalam Industri Kepariwisataan di Labuan Bajo

Pesona alam Manggarai Barat memang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Dan potensi wisata tersebut tentu dapat dimaksimalkan oleh masyarakat Labuan Bajo untuk dapat mendapatkan distribusi keuntungan dari pariwisata sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan alam tersebut. Budowski (1976; 27) berpendapat bahwa adalah mungkin untuk menciptakan simbiosis antara konservasi dan pariwisata. Dimana pariwisata seluruhnya atau sebagian didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari alam dan sumber dayanya dapat memberikan nilai ekonomi untuk konservasi spesies dan habitat.

Dengan mempromosikan pariwisata alam untuk menyediakan dana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan kawasan lindung dan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal dapat menjadi alternatif pilihan bagi pembuat kebijakan untuk dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan. Karena secara tidak langsung dengan memberikan pendapatan kepada masyarakat lokal yang cukup untuk lokal orang untuk menghargai, dan karena itu melindungi, area warisan margasatwa mereka sebagai sumber penghasilan (Goodwin, 1996: 91).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal penelitian dapat dibuat beberapa kesimpulan bahwa masyarakat Labuan Bajo mengakui adanya kebocoran dari kegiatan ekonomi lokal yang terkait dengan kepariwisataan sangat signifikan. Kurangnya keterampilan, serta industri pariwisata yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu membuat masyarakat lokal mengalami kesulitan besar untuk dapat memasuki industri pariwisata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pemerintah dan sektor swasta adalah pemangku kepentingan utama dalam industri pariwisata,

namun mereka belum dapat memberikan kebijakan yang dapat memberikan peran lebih besar yang mampu mendukung masyarakat lokal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam industri pariwisata. Untuk mengubah hal tersebut maka kebutuhan pelatihan harus ditangani, dan masyarakat lokal harus diberi dukungan untuk membangun diri.

Selain itu penelitian menemukan bahwa kapital sosial yang ada saat ini tidak mampu untuk berperan sebagai mekanisme utama yang mendorong dan menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Studi kasus menunjukkan potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dengan kekuatan pada keberadaan kapasitas lokal untuk menerapkan pendekatan partisipatif dengan peran penting dari kapital sosial.

1. Studi kasus pariwisata di Labuan Bajo telah menunjukkan bahwa bentuk pariwisata sangat tergantung pada potensi dan kapasitas pemimpin lokal dan keterampilan mereka di kepemimpinan, organisasi dan manajemen kegiatan. Dengan demikian, pendekatan *co-manajemen* bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kegiatan pariwisata dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Bowden, J. 2005. "Pro-poor tourism and the Chinese experience". *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 10(4): 379–398.
- Budowski, G. 1976. "Tourism and environmental conservation: Conflict, coexistence or symbiosis?" *Environmental Conservation*, 3 (1): 27–31
- Christie, Ian T. 2002. "Tourism, growth and poverty: Framework conditions for tourism in developing countries". *Tourism Review*, Vol. 57 Issue:1/2: 35-41

- Goodwin. H. 1996. In pursuit of ecotourism. *Biodiversity and Conservation*, 5: 277–91
- Goodwin, H. 2002. “Local Community Involvement in Tourism around National Parks: Opportunities and Constraints”. *Current Issues in Tourism*, 5(931414159), 338–360.
- Inskeep, E. 1988. “Tourism Planning: An Emerging Specialization”. *Journal of the American Planning Association*, 54(3): 360–372.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam DEPAG RI.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Relevance of social research* (Seventh, Vol. 8). Essex: Pearson Education Limited.
- Portes, A. 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam R. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sharpley, R. A. J. 2009. *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* Earthscan (Vol. 1). Sterling: Earthscan.
- Snyman, Susan Lynne. 2012. “The role of tourism employment in poverty reduction and community perception of conservation and tourism in Southern Africa.” *Journal of Sustainable Tourism*, 20(3) 395–416.
- Walpole M J & Goodwin H. 2000. “Local Economic Impacts of Dragon Tourism in Indonesia”. *Annals of Tourism Research*, 27 (3) 559–576
- Zeng, B., Carter, R. W., De Lacy, T., & Bauer, J. 2005. “Effects of Tourism Development on the Local Poor People: Case Study in Taibai Region China”, 5 (S), 131–148.
- Adi, I. R. 2012. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Belcher, J. R., Deforge, B. R. 2012. “Social Stigma and Homelessness: The Limits of Social Change”. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 22: 929–946.
- Gowan, T. 2010. *Hobos, Hustlers, and Blacksliders: Homeless In San Francisco*. Minneapolis: University Minnesota Press
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Midgley, J. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Neuman, W. L. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pleace, N., Burrows, R., Quilgars, D. 1997. *Homelessness and Social Policy: Homelessness in contemporary Britain*. Routledge : New York
- Silalahi, U. 2013. *Metode Penelitian Sosial (Cetakan Ketiga)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tarmansyah. 2003. *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas.
- Nasution, C., Thamrin, H. 2016. “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4 (2): 105–119.

- Neale, J. 1997. "Existing Theories of Homelessness". *Housing Studies. Issue 1. Vol. 12*: 47-61
- Ramadhani, W.C. 2017. "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon." *Jurnal Penelitian & PKM*, Juli 2017 Vol 4, No: 2: 241-245.
- Somerville, P.2013. "Housing, Theory and Society: Understanding Homeless". *Routledge Taylor and Francis Group*, Vol. 30, No. 4: 384–415.
- Widiati, E. 2006. *Evaluasi Bimbingan Kerja Di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur*. Depok: Universitas Indonesia.
- Zefianningsih, B. D, dkk. (2016). Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 3 Nomor: 1, 9-18.
- Zimmerman, L. J., Welch. J. 2011. "Displaced and Barely Visible: Archaeology and Material Culture of Homelessness. Historical Archaeologies of Engagement, Representation, and Identity." *Historical Archaeology*, Vol. 45. No. 1: 67–85
- Zastrow, C. 2004. *Introduction To Social Work And Social Welfare*. USA : Thomson Learning Inc.

*) **Willy Tandikara**, Mahasiswa S2 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia.
Email: willy.tandikara@honestbee.com

) **Prof. Dr. Robert Markus Zaka Lawang, Dosen Pascasarjana STISIP Widuri, Ketua STISIP Widuri, Jakarta